



PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.P/2021/PA.Nla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut pada perkara permohonan dispensasi kawin dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK xxx, Tempat Tanggal Lahir Banyuwangi, 05 Maret 1938, umur 83 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak terkait dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 September 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 209/Pdt.P/2021/PA.Nla dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah anak Kandung Pemohon :

NIK : xxx
TTL/Umur : Debowae, 15 November 2003/ 17 tahun 10 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa
Tempat kediaman di : RT.xx RW.xx Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru;

dengan calon suaminya

Nama : **Xxx**
NIK : xx
TTL/Umur : Debowae, 09 Juni 2000, Umur 21 tahun 3 Bulan
Agama : Islam

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa

Tempat kediaman di : Desa xx Kecamatan xx, Kabupaten Buru

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waelata;

2. Bahwa anak Kandung dari Pemohon yang akan dinikahkan adalah hasil perkawinan Pemohon dengan xxx;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun. Dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, dan diperintahkan kepada Pemohon untuk mengurus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Namlea;
4. Bahwa pernikahan tersebut harus dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan selama 1 tahun, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melanggar aturan agama;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan secara syariat Islam;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil balig serta siap menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon yang memiliki pekerjaan sebagai petani memiliki penghasilan perbulan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan siap menanggung segala kebutuhan anak Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menikahkan anak Pemohon bernama Xxx dengan calon suaminya Xxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap *in person* di persidangan

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon, anak kandung Pemohon, orangtua calon suami anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, yakni menunggu sampai dengan anak tersebut dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini beresiko terhadap kesiapan reproduksi anak kandung Pemohon, juga berdampak sosial dan ekonomi yang belum mapan serta kesiapan psikologis keduanya yang berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga anak kandung Pemohon nantinya, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan siap menghadapi segala resiko tersebut, serta memohon agar perkaranya tetap dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan tidak ada paksaan untuk pernikahan mereka;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak kandung Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang agama, apabila tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Xxx;
- Bahwa keluarga calon suami anak kandung Pemohon merestui hubungan anak kandung Pemohon dengan anak mereka, serta keluarga calon suami anak kandung Pemohon telah melamar anak kandung Pemohon dan diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing anak kandung serta calon suaminya kelak agar mereka dapat membina rumah tangganya dengan rukun;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini sebagai berikut:

Bahwa telah didengar keterangan anak kandung Pemohon, bernama Xxx, umur 17 tahun 10 bulan dan calon suaminya bernama Xxx umur 21 tahun 3 bulan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Xxx saat ini berusia 17 tahun 10 bulan berstatus perawan, sementara Xxx berusia 21 tahun 3 bulan berstatus jejak;
- Bahwa Xxx setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah serta menjadi seorang ibu rumah tangga tanpa paksaan dari pihak manapun, begitu juga dengan calon suami anak kandung Pemohon Xxx sudah siap menjadi kepala rumah tangga serta telah memiliki pekerjaan sebagai Petani dengan penghasilan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Xxx dan Xxx mengetahui rencana perkawinan keduanya dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan keluarga calon suami telah melamar kepada keluarga Xxx sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa sejak saling kenal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun kami jalani dengan sewajarnya dan kami tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar norma kesusilaan maupun agama;
- Bahwa Xxx tidak dalam kondisi hamil;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak kandung Pemohon bernama xxxx (ayah kandung), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak kandung Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Xxx dan Xxx, sebab orang tua calon suami anak kandung Pemohon serta Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi keduanya sebab hubungan keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa antara Xxx dan Xxx tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Xxx dan keluarga Xxx seluruhnya menyetujui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa Xxx dan Xxx sudah dewasa, berperilaku baik dan bertanggung jawab serta siap untuk membina rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru Nomor xxx tanggal 08 September 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waelata dengan nomor xxx tanggal 20 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya. Selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2021/PA.Nla



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak kandung Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon yang merupakan ayah kandung dari Xxx, hal mana dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/ orang tua wanita dapat minta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai saksi-saksi pendukung yang cukup", serta ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ditentukan Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua calon mempelai. Dan setelah Hakim mendengar keterangan atau pengakuan Pemohon serta berdasarkan bukti yang diajukan, oleh karenanya Pemohon adalah ayah kandung dari calon mempelai perempuan, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* dan berkapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 RBg, maka Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Xxx dengan calon suaminya, sebab anak kandung Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 17 tahun 10 bulan;

Menimbang bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon, anak kandung Pemohon, orangtua calon suami anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon untuk mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai dengan anak tersebut dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini beresiko terhadap kesiapan reproduksi anak kandung Pemohon, juga berdampak sosial dan ekonomi yang belum mapan serta kesiapan psikologis yang berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga anak kandung Pemohon nantinya, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan siap menghadapi segala resiko tersebut, serta memohon agar perkaranya tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru serta Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waelata, dengan demikian maka terbukti berdasarkan bukti-bukti tersebut bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Xxx dengan Xxx telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waelata Kabupaten Buru karena anak Pemohon (Xxx) masih berusia 17 tahun 10 bulan yakni masih dibawah usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak kandung Pemohon, orangtua calon suami anak kandung Pemohon dan calon

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak kandung Pemohon, dihubungkan dengan bukti Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya bernama Xxx dengan calon suami bernama Xxx telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waelata Kabupaten Buru karena usia anak kandung Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak kandung Pemohon berusia umur 17 tahun 10 bulan berstatus perawan dan calon suami anak kandung Pemohon berumur 21 tahun 3 bulan berstatus jejak;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan serta calon suami anak kandung Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Petani dengan penghasilan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak saling kenal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun anak kandung Pemohon dengan calon suaminya jalani dengan sewajarnya dan keduanya tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar norma kesusilaan maupun agama;
- Bahwa anak kandung Pemohon tidak dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Pemohon mohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang atau surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata alasan Pemohon ingin menikahkan anak kandung Pemohon adalah hanya karena Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang menurut Hakim Tunggal hal tersebut tidak beralasan jelas dan juga keterangan dari anak kandung Pemohon yakni kondisi anak kandung Pemohon tidak dalam kondisi hamil maupun keadaan lain yang mendesak, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa keadaan anak tersebut belum termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon, sejak saling kenal hingga berpacaran hingga sekarang kurang lebih 1 tahun mereka jalani dengan sewajarnya dan tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar norma kesucilaan maupun agama;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim Tunggal berpendapat alasan permohonan Dispensasi Kawin Pemohon belum memenuhi kategori alasan mendesak serta Pemohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti pendukung yang cukup, oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan ditolaknya Pemohonan Dispensasi Nikah Pemohon, maka anak kandung Pemohon dapat menunggu hingga cukup usia 19 tahun serta kondisi anak kandung Pemohon secara fisik maupun psikis lebih matang untuk memasuki bahtera rumah tangga, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 huruf (a) yakni dalam memeriksa perkara Dispensasi Kawin Hakim harus mengadili berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Pemohon, anak kandung Pemohon, orangtua calon suami anak kandung Pemohon serta calon suami anak kandung Pemohon agar menunda rencana perkawinan tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon suaminya tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak kandung Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, 29 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1443 Hijriah oleh Syarifa Saimima, S.H.I sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Ismail Paisuly, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ismail Paisuly, S.H

Syarifa Saimima, S.H.I

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 60.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 100.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah

Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)